

## **PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI RISIKO BENCANA BERBASIS GENDER**

Fitri Susilowati<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta<sup>1</sup>

[fitri.susilowati82@gmail.com](mailto:fitri.susilowati82@gmail.com)

Lilik Siswanta<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta<sup>2</sup>

[liliksiswanta@gmail.com](mailto:liliksiswanta@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purposes of community service activity are: (1) raise public awareness toward disaster risk is that have potentially to damage the property of human life and life itself; (2) living in harmony with nature. The partners of this activity are a hamlet chief, youth organization (Karangtaruna), and group of women (PKK) in Patalan, Jetis, Bantul. The model of method of devotion that has been conducted are coaching and counseling, mentoring, simulations and providing mitigation equipment. Detail of activities in order to improvement community of capacity i.e. socialization, Focus Group Discussion (FGD), determine the evacuation route, develop organizational relation, Standard operating procedures (SOP), First Aid Training and Simulation. Activity of community service was very supported by Local Coping Disaster Board (BPBD) Bantul. The impact of activities are: (1) increasing the awareness, knowledge, skills and capacity for disaster risk management, (2) increasing the role of women in disaster mitigation, (3) the increasing of community preparedness in order to coping disaster risk, (4) Developing of SOP document, Relationship institutional, Voluntary team), (5) opening of access for cooperation with the administering agency disaster Management District level, i.e BPBD Bantul, (6) Realization of improvement of skill community related with of disaster mitigation, (7) Establishment of module activities, (8) the establishment of the voluntary team hamlet, (9) realization of village disaster preparedness.*

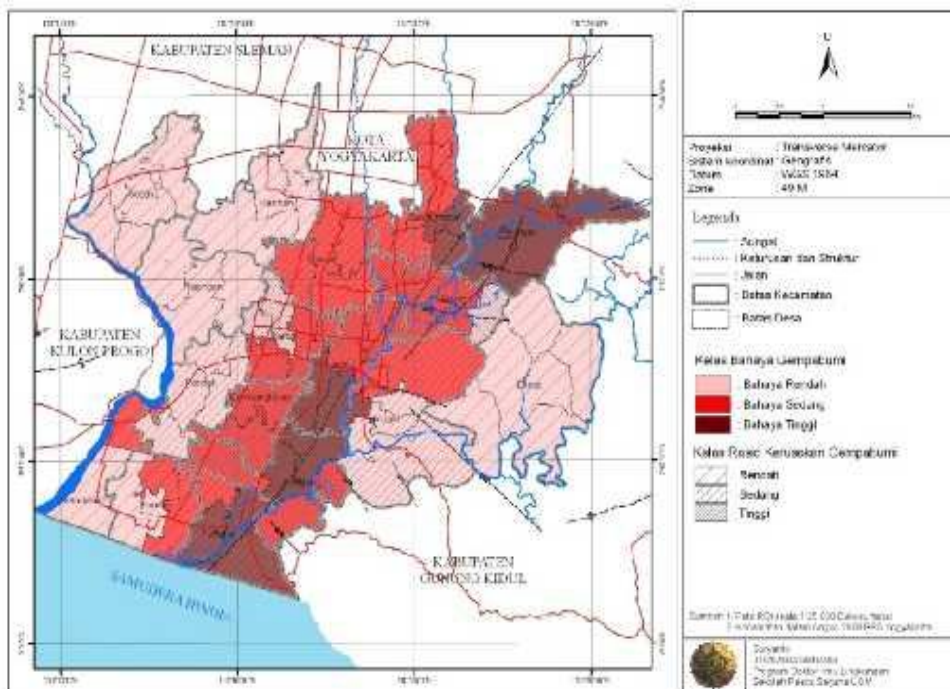
**Keywords :** Gender, risk, disaster, capacity, mitigation

## PENDAHULUAN

Keterlibatan peran perempuan terutama kaum ibu dalam mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan. Beberapa kejadian bencana dalam dekade terakhir terbukti peran perempuan lebih sering sebagai objek dalam manajemen risiko. Kaum perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki daya apa pun ketika terjadi bencana. Bahkan, sebagai objek manajemen risikopun seringkali kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Pengelolaan bencana yang kebanyakan adalah laki-laki kurang memahami dan kurang memenuhi kebutuhan khususnya kaum perempuan. Rendahnya keterlibatan

kaum perempuan karena ketersediaan akses untuk peningkatan kapasitasnya dalam penanggulangan risiko bencana masih terbatas.

Peningkatan kapasitas terhadap kaum perempuan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan. Keberhasilan program mitigasi berbasis kepada masyarakat sangat ditentukan oleh keterlibatan perempuan. Perempuan terutama ibu-ibu adalah pihak yang lebih sering berada di rumah dibanding dengan laki-laki. Mereka berperang anda sebagai ibu rumah tangga juga sebagian mencari nafkah.



Sumber: Suryanto (2012)

Gambar 1. Tingkat Kerawanan Wilayah Terhadap Gempabumi

Kejadian gempa bumi 27 Mei 2006 dan gempa bumi beberapa tahun yang lalu menjadi sinyal bahwa kejadian gempa bumi akan selalu terjadi terutama di wilayah-wilayah yang rawan. Kecamatan Jetis adalah salah satu kecamatan yang tingkat kerawanannya paling tinggi di Kabupaten Bantul.

Pemerintah tidak akan mampu melakukan manajemen risiko bencana secara optimal tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat dalam manajemen risiko bencana mutlak diperlukan karena masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari manajemen risiko bencana. Pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Bantul, masyarakatlah pelaku utama mitigasi dan masyarakat pula yang berpotensi menderita kerugian seandainya gempa bumi terjadi lagi. Optimalisasi peran pemerintah harus segera diwujudkan dalam kegiatan yang riil. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran masyarakat dapat dimulai dari proses pemahaman, pengembangan kapasitas, menggabungkan kajian risiko, dan dukungan teknis (Haifani, 2008).

Optimalisasi peran masyarakat tersebut tentunya harus melibatkan seluruh masyarakat baik kaum laki-laki ataupun perempuan. Gempayang terjadi di Bantul tahun 2006 ternyata menimbulkan banyak sekali korban jiwa, terutama perempuan dan anak-anak. Tetapi penanganan bencana juga seringkali kurang memperhatikan kebutuhan dan keterlibatan

perempuan. Pengelola bencana yang kebanyakan adalah kaum laki-laki dan kurang memahami dan kurang memenuhi kebutuhan khususnya perempuan. Selain itu perempuan seringkali juga tidak dipertimbangkan dan tidak diikuti sertakan dalam kegiatan penanganan bencana, termasuk dalam fase tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mitigasi bencana (Hidayati, 2012).

Pedukuhan Butuh Desa Patalan, Karang Taruna serta Kelompok Ibu-Ibu PKK adalah kelompok strategis yang dapat diberdayakan untuk memiliki peran dalam membentuk sebuah desa siaga bencana. Pembentukan desa siaga bencana harus diawali dengan adanya pembinaan terhadap anggota-anggota masyarakat agar memiliki pemahaman dan pengetahuan yang homogen terhadap bencana.

Tujuan dari pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi peningkatan kapasitas masyarakat adalah: 1) Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam manajemen risiko bencana; dan 2) Meningkatnya pembinaan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana.

### **Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat**

Menurut UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berkelanjutan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan

dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana (Hertanto, 2009), antara lain:

1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tata guna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana.
2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan.
3. Identifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik.
4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat preventif kebencanaan.
5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan

indikasi akan adanya ancaman bencana.

Konsep dasar manajemen bencana berbasis masyarakat adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat atau mengurangi kerentanan masyarakat. Besaran bencana merupakan akumulasi berbagai ancaman bahaya dengan rangkaian kerentanan yang ada di masyarakat. Rangkaian kerentanan ini antara lain terdiri dari kemiskinan, kurangnya kewaspadaan, kondisi alam yang sensitif, ketidakberdayaan, dan berbagai tekanan dinamis lainnya. Kerentanan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain berbeda akar masalahnya, demikian pula ancaman bahayanya pun berbeda-beda jenisnya.

Tujuan dari manajemen bencana berbasis masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan kesiap-siagaan masyarakat, terutama daerah-daerah yang rawan bencana
2. Memperkenalkan cara membuat peta bahaya setempat
3. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
4. Mengembangkan organisasi bencana di daerah
5. Memperkaya pengetahuan masyarakat dengan pendidikan tentang bencana
6. Mempertinggi kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup

## **METODE PENGABDIAN/APLIKASI**

Metode yang digunakan dalam pengabdian adalah:

1. Metode bimbingan peningkatan daya tolak risiko dengan cara ceramah manajemen risiko, pelatihan mitigasi risiko bencana, pelatihan *Achievment Motivation Training*.
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta melalui ceramah, praktek mitigasi dari saat persiapan, proses, *finishing* dan pengemasan
3. Pemberian atau penambahan peralatan pada saat pelatihan, sedangkan bagi peserta yang memiliki potensi/bakat dapat dibina untuk menjadi kader pelatihan mitigasi bencana di wilayah-wilayah lain.

## **HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK**

Hasil dari kegiatan pengabdian adalah: (1) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam manajemen resiko bencana, (2) Meningkatnya peran kaum perempuan dalam mitigasi bencana, (3) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, (4) Tersusunnya dokumen (SOP, Jalur Evakuasi, Hubungan kelembagaan, Tim Relawan) sehingga dapat meningkatkan terbinanya tata kehidupan dan penghidupan yang sadar terhadap risiko bencana, (5) Terbukanya akses kerjasama dengan lembaga penyelenggara

Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten, yaitu BPBD Kabupaten Bantul, (6) Terealisasi Bantuan Peralatan untuk peningkatan Skill warga dalam mitigasi bencana., (7) Tersusunnya modul kegiatan, (8) Terbentuknya Tim Relawan Dusun, (9) Dusun siaga bencana.

Kegiatan pengabdian mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada tahap pertama yang dilakukan tim pengabdian adalah melakukan sosialisasi kegiatan pengabdian. Kegiatan sosialisasi melibatkan seluruh warga di dusun butuh, yaitu sekitar 150 kepala keluarga. Peserta dari kegiatan tersebut terdiri dari Ibu-Ibu PKK, Karangtaruna, Bapak-bapak dan lansia. Warga memberikan respon dan tanggapan positif terhadap rencana kegiatan pengabdian. Pada kegiatan sosialisasi, pengabdian memaparkan tentang latar belakang, maksud, tujuan serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, dipaparkan juga tentang peraturan penanggulangan bencana UU No.24 Tahun 2007. Agenda terakhir pada tahap sosialisasi adalah pembentukan tim koordinator per RT dan tim relawan

Tahap kedua adalah *Focus Group Discussion* (FGD), pengabdian memaparkan uraian tentang manajemen risiko dan analisis kebencanaan. Selanjutnya warga

diminta untuk melakukan diskusi dan menentukan analisis kebencanaan di dusun butuh. Warga dibagi menjadi empat kelompok untuk menganalisis kebencanaan, yaitu analisis Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas dusun butuh. Pada tahap identifikasi berdasarkan kejadian yang telah terjadi di dusun butuh dapat disimpulkan bahwa bahaya yang paling besar skalanya adalah gempa bumi. Selanjutnya untuk identifikasi kerentanan ada lima aspek, yaitu : lingkungan, fisik, sosial budaya, ekonomi, sumber daya manusia. Pada identifikasi risiko yang memiliki dampak paling besar adalah gempa bumi. Identifikasi kapasitas meliputi lima aspek, yaitu lingkungan, fisik, sosial budaya, ekonomi dan SDM.

Tahap ketiga adalah pembuatan jalur evakuasi. Kegiatan pembuatan jalur Evakuasi diawali dengan pemaparan materi oleh Tim Pengabdian. Selanjutnya warga membuat peta Dusun Butuh. Warga mengidentifikasi rumah yang ada di dusun butuh, termasuk rumah warga yang penghuninya lansia, balita, ibu hamil atau orang sakit. Identifikasi tersebut dituangkan dalam peta. Warga juga membuat kesepakatan titik kumpul ketika terjadi gempa bumi adalah di halaman bekas SD Monggang, selanjutnya digambarkan dalam peta jalur evakuasi.

Tahap keempat adalah menyusun hubungan kelembagaan. Pada kegiatan ini, warga mengidentifikasi lembaga,

peran dan hubungan antar lembaga tersebut. Lembaga yang memiliki peran paling besar dalam penanggulangan bencana adalah Karangtaruna, tetapi perannya juga didukung oleh lembaga lainnya yang ada di dusun butuh. Kelembagaan tersebut adalah : PKK, kelompok tani, IRMAS (Ikatan Remaja Masjid), TPA, Kelompok pengajian, Bank BRI, Kelompok Ronda, Kelompok RT, Kelompok Kandang, PPL PAUD, Lansia, POSYANDU, Kader Kesehatan, PNPM, LPMD. Hubungan kelembagaan tersebut dapat dioptimalkan dalam berbagai kegiatan sosial sehingga terbina tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana.

Tahap kelima adalah penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur). Standar ini termasuk apa yang menjadi tugas dari setiap anggota keluarga, dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Pada kegiatan ini masyarakat membuat SOP secara umum untuk :

1. Rumah tahan gempa, rumah dengan konstruksi tahan gempa
2. Rumah tidak tahan gempa, rumah yang tanpa ada kolom atau cor bertulang
3. Rumah Rentan, rumah yang ada kelompok rentannya (Lansia, Balita, sakit)

Tahap keenam adalah Penyusunan Skenario. Warga membuat alur cerita dan *run down* rencana simulasi yang akan

dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan panduan, gambaran, situasi dan kondisi seperti terjadinya gempa bumi yang sebenarnya.

Tahap ketujuh adalah Pelatihan Pertolongan Pertama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali peserta terkait dengan tindakan yang dilakukan setelah terjadi gempa. Tujuan dari pelatihan ini adalah:

1. Memberi pengetahuan proses pemberian pertolongan pertama.
2. Memberi pengetahuan teknik-teknik pemberian pertolongan sesuai dengan kondisi korban.
3. Memahami pelaksanaan evakuasi korban kecelakaan terutama gempa secara tepat dan benar.

Tahap kedelapan adalah Simulasi, Simulasi gempa bumi merupakan pembelajaran dini jika terjadi gempa di sekitar kita. Dalam simulasi gempa bumi akan diajarkan dan dipraktikkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi (sesuai dengan SOP, pengetahuan tentang penyelamatan, pertolongan pertama pada korban, koordinasi tim relawan dan tim siaga yang telah dibuat) dan penanganannya serta hal-hal yang dilakukan setelah terjadi gempa bumi. Dengan adanya simulasi gempa bumi diharapkan masyarakat terbiasa melakukan kegiatan penyelamatan, sehingga dapat meminimalkan kejadian atau hal-hal buruk saat terjadi gempa bumi.

Dampak dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya

pengetahuan, keterampilan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi yang mendorong kesadaran warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam manajemen atau pengelolaan bencana. Masyarakat memiliki kapasitas untuk meningkatkan peran sertanya dalam penanggulangan bencana (pra, saat dan pasca). Meningkatnya kapasitas dan peran serta warga akan mengurangi risiko akibat gempa bumi. Terciptanya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana akan mewujudkan kemandirian warga untuk menanggulangi bencana. Pada akhirnya diharapkan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi untuk menghadapi resiko bencana gempa bumi.

## **PENUTUP**

Kegiatan pelaksanaan program lbM ini mendapatkan dukungan positif dari mitra dan aparat pemerintah desa Patalan Jetis Bantul. Kegiatan pengabdian ini meliputi delapan tahapan, kedelapan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Meskipun ada sedikit kendala dalam mempertemukan seluruh anggota kelompok karena kesibukan masing-masing. Kegiatan lbM yang telah dilakukan dapat:

1. Meningkatnya peran serta warga dalam mitigasi bencana terutama kaum perempuan



2. Masyarakat memiliki keterampilan menghindari diri dari risiko bencana.
3. Masyarakat mengetahui tindakan penyelamatan
4. Masyarakat memiliki pengetahuan pertolongan pertama.
5. Masyarakat memiliki ketrampilan kesiapsiagaan prabencana, saat bencana, dan pascabencana.
6. Masyarakat memiliki keterampilan dalam penanganan darurat
7. Masyarakat memiliki ketrampilan keberlangsungan penanganan
8. Masyarakat memiliki tim relawan dan tim siaga dalam penanggulangan bencana.
9. Masyarakat dapat mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut
10. Masyarakat mengetahui mengkomunikasikan penanggulangan bencana ke pihak terkait.
11. Masyarakat dapat membina tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang sadar terhadap risiko bencana

Kegiatan pengabdian lbM ini memberikan manfaat kepada masyarakat terutama warga Dusun Butuh Patalan, Jetis, Bantul yaitu:

1. Masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan, kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
2. Meningkatkan peran serta warga masyarakat terutama kaum perempuan dalam penanggulangan bencana.
3. Dusun memiliki akses dengan BPBD Kabupaten Bantul.
4. Tim Relawan dapat menjadi kader menjadi kader pelatihan mitigasi bencana di wilayah-wilayah lain.
5. Peningkatan *skill* warga didukung dengan bantuan peralatan untuk mitigasi bencana, (tenda, tas siaga, peralatan dapur umum).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada :

1. KEMENRISTEKDIKTI
2. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta
3. Kepala LPPM Universitas PGRI Yogyakarta
4. Kepala Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Yogyakarta
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Bantul
6. Kepala Dusun Butuh
7. Mitra Pengabdian : Kelompok PKK dan Karang Taruna
8. Warga Dusun Butuh
9. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Haifani,A. Muktaf.,(2008), "Manajemen Resiko Bencana Gempa Bumi (Studi Kasus Gempa Bumi Yogyakarta 27 Mei 2006)", *Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir* Yogyakarta, 25-26 Agustus 2008
- Hidayati, D. 2012. "Akses dan Keterlibatan Perempuan dan Laki-laki Dalam Penanganan Bencana" dalam *Pengelolaan*



Bencana Berbasis Gender:  
Pembelajaran Dari Gempa  
Bantul 2006. Editor Deny  
Hidayati. Jakarta: PT Dian Rakyat  
dan PPK-LIPI.

Hertanto H (2009), Manajemen  
Bencana Berbasis Masyarakat,  
Media Indonesia dalam  
[http://maysandi.blogspot.co.id/  
2012/04/manajemen-bencana  
manajemen-bencana.html](http://maysandi.blogspot.co.id/2012/04/manajemen-bencana-manajemen-bencana.html)

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun  
2012 tentang Pedoman Umum  
Desa/Kelurahan Tangguh  
Bencana

Suryanto(2012), "Risk Perception and  
Economic Value of Disaster  
Mitigation Case of Bantul Post  
Earthquake May 2006", *South  
East Asian Journal of  
Management*, vol6 no. 2, Post  
Graduated Program, Universitas  
Indonesia, Jakarta.

Undang – Undang No.24 Tahun 2007  
tentang peraturan penanggulangan  
bencana